

TRIWULAN II 2026



LAPORAN KINERJA

PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan menyajikan perkembangan kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja dan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan secara konkret dalam mencapai sasaran serta indikator kinerja kegiatan.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada triwulan berikutnya guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Juli 2026

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan



Fayon Hikmayani, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	12
C. Keragaan Pegawai.....	16
D. Potensi dan Permasalahan	21
E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	24
F. Sistematika Laporan Kinerja	24
BAB II	26
PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis.....	26
B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026	32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	33
D. Pengukuran Kinerja	35
BAB III	38
AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	38
C. Akuntabilitas Keuangan	65
D. Efisiensi Sumber Daya	68
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Permasalahan dan Tindaklanjut.....	70
LAMPIRAN	72

Daftar Gambar

Gambar 1 Nilai Kinerja Organisasi Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026.....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.....	12
Gambar 3 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	13
Gambar 4 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	15
Gambar 5 Komposisi pegawai per satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026.....	17
Gambar 6 Jumlah pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis kelamin.....	18
Gambar 7 Keragaan pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis Jabatan Fungsional.....	19
Gambar 8 Keragaan dan Sebaran Penyuluh Perikanan pada Wilayah Kerja per Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 ..	20
Gambar 9 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan tingkat pendidikan	20
Gambar 10 Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy).....	30
Gambar 11 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	35
Gambar 12 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusluh KP pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan II Tahun 2026	38
Gambar 13 Empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP	57

Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Kinerja Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026	8
Tabel 2 Jumlah pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan status kepegawaian	17
Tabel 3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusluh KP TA 2026	33
Tabel 4 Pagu Anggaran Unit Kerja lingkup Pusluh KP Tahun 2026	33
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2026	34
Tabel 6 Bobot validitas IKK	35
Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja	37
Tabel 8 Capaian IKK Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026	39
Tabel 9 Capaian IKK 1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan	41
Tabel 10 Rincian capaian Persentase Kelompok Pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya.....	42
Tabel 11 Jumlah kelompok yang ditingkatkan Tahun 2025-2026	43
Tabel 12 Jumlah kelompok yang disuluh Tahun 2025.....	43
Tabel 13 Capaian IKK 8 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	52
Tabel 14 Nilai Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Lingkup BPPSDM Triwulan II Tahun 2026	53
Tabel 15 Capaian IKK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	55
Tabel 16 Nilai perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan unit kerja Eselon II lingkup BPPSDM	55
Tabel 17 Capaian IKK 12 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	60

Tabel 18 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM Triwulan II Tahun 2026	60
Tabel 19 Capaian IKK 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	63
Tabel 21 Perbandingan Capaian IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Pusat lainnya	64
Tabel 22 Realisasi anggaran lingkup Pusluh KP	65
Tabel 23 Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran IKK Pusat Penyuluhan Triwulan II Tahun 2026	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2026, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melaksanakan dua sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kedua sasaran tersebut didukung melalui pelaksanaan dua kegiatan utama, yaitu Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP, dengan total pagu anggaran sebesar Rp681.528.764.000.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung oleh 4.258 pegawai, terdiri atas 2.369 PNS (55,64%), 1.818 PPPK (42,70%), dan 71 PPPK Paruh Waktu (1,76%). Sebagian besar pegawai merupakan Jabatan Fungsional Tertentu, dengan Penyuluh Perikanan sebagai jabatan fungsional terbanyak yang berjumlah 3.911 orang, sehingga menjadi kekuatan utama organisasi dalam melaksanakan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi akses kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mencapai 112,99% dengan predikat **Istimewa**, yang menunjukkan bahwa secara umum target kinerja Triwulan II telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 1 Nilai Kinerja Organisasi Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026

Dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2026, terdapat beberapa indikator yang memang memiliki periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan pengukuran capaian pada Triwulan II. Sementara itu, indikator yang diukur secara triwulanan maupun semesteran menunjukkan capaian yang sangat baik, antara lain:

- Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya mencapai 108% dari target triwulanan.
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja mencapai 116,28%.
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 115,64%.
- Indeks Profesionalitas ASN mencapai 120%.
- Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SiRUP mencapai 120% (dibatasi maksimum pada aplikasi Kinerjaku).

Tabel 1 Capaian Kinerja Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja Kehidupan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	%
• Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13%	4%	4,32%	108%
• Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%)	86%	86%	100%	116,28%
• Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)	92,1	84	97,14	115,64%
• Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	82	70	84,31	120% (120,44%)
• Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SIRUP (%)	77%	77%	100%	120% (130)

Catatan : Persentase pada aplikasi kinerjajaku maksimal 120%

Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp355.050.499.906 atau 51,10% dari total pagu anggaran sebesar Rp681.528.764.000 Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan sumber daya manusia yang memadai, jumlah Penyuluh Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia, penguatan koordinasi melalui pembentukan tim kerja, meningkatnya kualitas pengendalian internal, serta komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target kinerja organisasi. Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian, terutama peningkatan kualitas data dukung capaian kinerja, keselarasan dokumen pelaporan dengan ketentuan yang berlaku, serta penguatan proses verifikasi dan validasi data agar kualitas akuntabilitas kinerja semakin meningkat.

Ke depan, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan akan terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan data kinerja. Langkah

tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja hingga akhir Tahun 2026 sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya melalui penyusunan Laporan Kinerja sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketentuan tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi yang menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan program, penganggaran, serta peningkatan pelayanan publik.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, fasilitasi perizinan berusaha, pengembangan percontohan penyuluhan, serta penguatan kompetensi penyuluh kelautan dan perikanan. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi pada *Blue Economy*, peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir, serta peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam periode pembangunan 2025–2029, arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu *engine of growth* yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penyuluhan yang efektif dan berkualitas.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BPPSDM KP menetapkan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui penyuluhan dengan pendekatan *SUPER Extension* (*Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable*) sebagai salah satu program prioritas dalam Renstra BPPSDM KP Tahun 2025–2029. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan melalui penguatan kapasitas penyuluh, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kelembagaan pelaku usaha, serta penyediaan materi dan metode penyuluhan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai unit pelaksana kegiatan penyuluhan, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat dua sasaran kegiatan dengan empat belas indikator kinerja yang mencakup aspek penyelenggaraan penyuluhan dan tata kelola

pemerintahan yang efektif serta akuntabel. Pencapaian indikator-indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPPSDM KP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta pemanfaatan sumber daya yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:



Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusluh KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- penyusunan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan model pemberdayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan fasilitasi penyusunan model percontohan untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

- g. pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi Kelautan dan Perikanan;
- j. koordinasi dan pengelolaan tenaga penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- k. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusluh KP, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat tugas Nomor B.431/BPPSDM.2/KP.440/II/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang penugasan pegawai sebagai Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Lampiran), yang selanjutnya diubah melalui Surat Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor B.1470/BPPSDM.2/KP.440/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026. Dalam surat tugas tersebut, pegawai Pusluh KP ditugaskan menjadi: 1) Tim Kerja Teknis yang melaksanakan tugas terkait teknis penyuluhan (kelembagaan, pelaksanaan, percontohan dan ketenagaan penyuluhan) dan 2) Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas terkait dukungan manajemen (Keuangan, PBJ, BMN dan Umum, Program Anggaran, Monev dan Pelaporan, Kepegawaian, Kearsipan, Data Penyuluhan dan Kelautan, Media Sosial, Pengawasan dan Tindak Lanjut). Dalam pembagian tugas tersebut, Kepala Pusat membagi tanggung jawab pelaksanaan kinerja kepada seluruh pegawai.



Gambar 4 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Setiap Tim Kerja di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2026, sebagai berikut:

1. **Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggung jawab pada Indikator Kinerja *Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya*.
2. **Tim Kerja Pelaksanaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan*; serta *Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan*.
3. **Tim Kerja Percontohan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan*; serta *Desa Perikanan Cerdas yang menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan*.
4. **Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi*.
5. **Sub Bagian Tata Usaha**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan*, *Persentase Rekomendasi hasil pengawasan*

yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP, serta Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

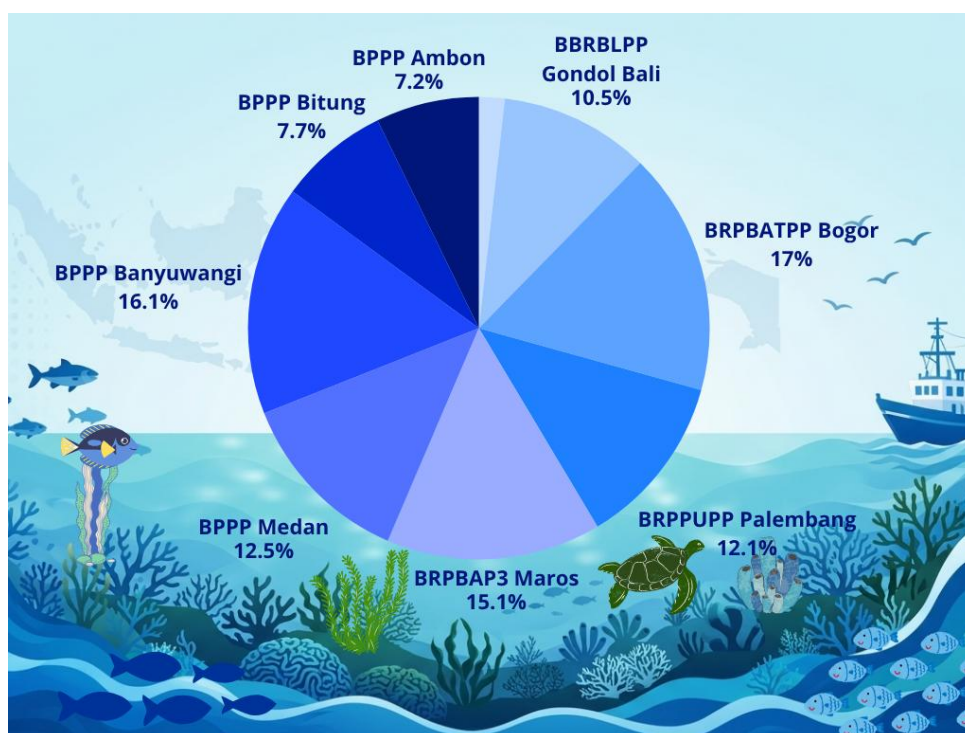
Selain itu, dalam mencapai target kinerja kegiatan penyuluhan, Pusluh KP juga didukung oleh empat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Eks Riset, yaitu Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, dan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan; serta empat UPT Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.

C. Keragaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung oleh pegawai yang berkompeten. Pada Triwulan II jumlah pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebanyak 4.258 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 2.369 orang (55,64%), PPPK sebanyak 1.818 orang (42,70%), dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 71 orang (1,76%).

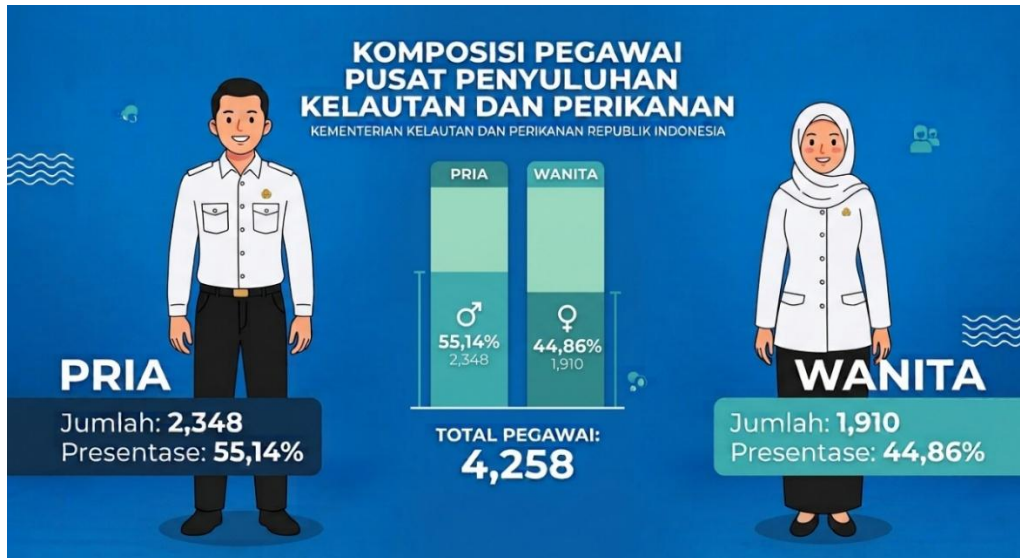
Tabel 2 Jumlah pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan status kepegawaian

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH PEGAWAI PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS					
No	SATUAN KERJA	STATUS PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	
1	Pusat Penyuluhan KP	44	25	8	77
2	BBRBLPP Gondol	243	198	7	448
3	BRPBATPP Bogor	329	379	15	723
4	BRPPUPP Palembang	310	199	6	515
5	BRPBAPPP Maros	410	219	12	641
6	BPPP Medan	230	302	2	534
7	BPPP Banyuwangi	374	306	4	684
8	BPPP Bitung	207	116	5	328
9	BPPP Ambon	222	74	12	308
TOTAL		2.369	1.818	71	4.258
PERSENTASE (%)		55,64%	42,70%	1,76%	100,00%



Gambar 5 Komposisi pegawai per satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026

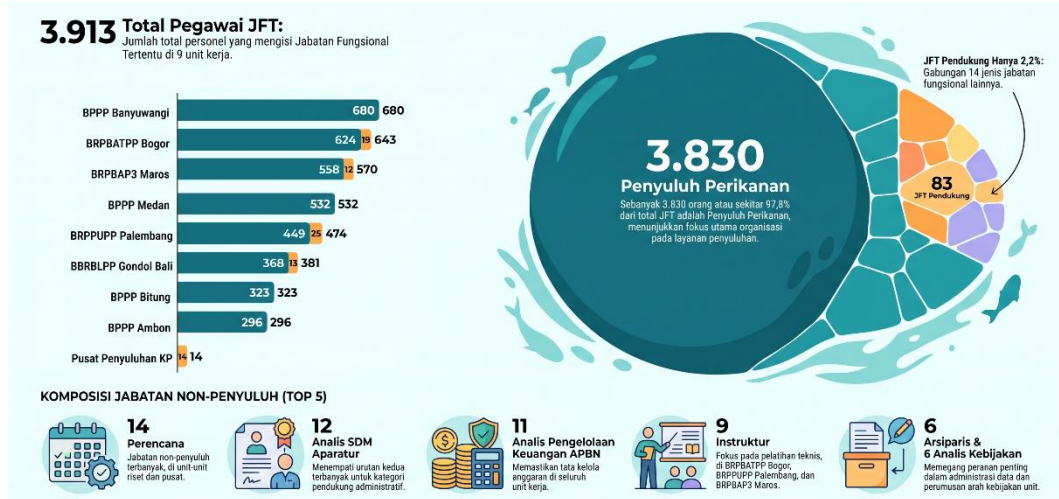
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu lingkup Pusluh KP mempunyai komposisi 2.348 orang laki-laki (55,14%) dan 1.910 orang Perempuan (44,86%).



Gambar 6 Jumlah pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis kelamin

komposisi jumlah pegawai dengan Jabatan Struktural sebanyak 9 orang atau 0,21%, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS sebanyak 2.232 orang atau 52,42%, Jabatan Fungsional Umum (JFU) PNS sebanyak 138 orang atau 3,24%, JFT PPPK sebanyak 1.681 orang atau 39,48%, JFU PPPK sebanyak 127 orang atau 2,98% dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 71 orang atau 1,67%.

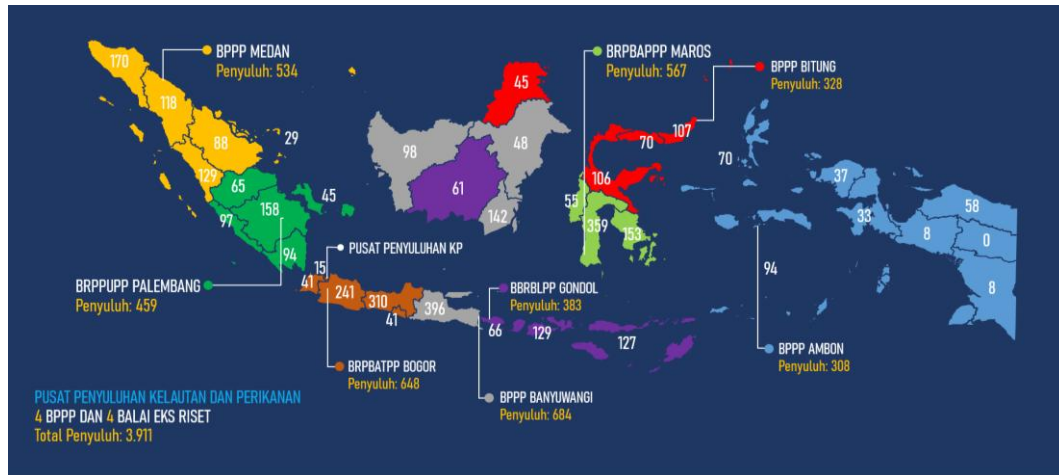
Dari 4.258 orang pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdapat 3.913 orang yang menduduki JFT pada 15 jenis jabatan fungsional tertentu (Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi, Analis Kebijakan, Analis Hukum, Perencana, Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Penata Laksana Barang, Penyuluh Perikanan, dan Instruktur) sebagai berikut:



Gambar 7 Keragaan pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis Jabatan Fungsional

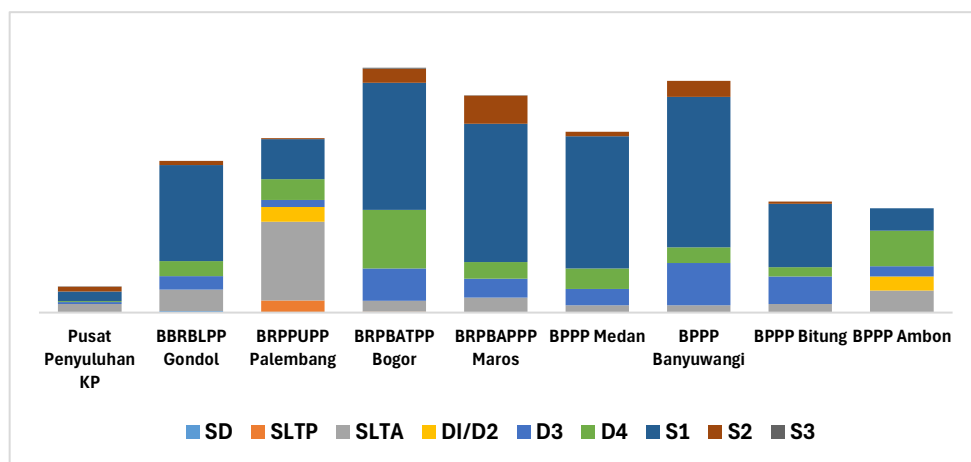
Penyuluh Perikanan merupakan jabatan fungsional tertentu dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik organisasi yang berorientasi pada pelaksanaan fungsi penyuluhan sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Penyuluh Perikanan memiliki peran strategis dalam mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, fasilitasi akses terhadap permodalan, teknologi, pasar, dan kemitraan usaha, serta pembinaan penerapan praktik usaha yang berkelanjutan. Keberadaan Penyuluh Perikanan dalam jumlah yang memadai menjadi modal utama bagi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan, memperluas jangkauan layanan penyuluhan, serta mempercepat implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Penyuluh Perikanan pada Triwulan II 2026 adalah 3.911 orang (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu). Keragaan dan sebaran Penyuluh Perikanan di lingkup Pusluh KP adalah sebagai berikut:



Gambar 8 Keragaan dan Sebaran Penyuluh Perikanan pada Wilayah Kerja per Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai per Triwulan II Tahun 2026, di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dari jumlah pegawai sebanyak 4.258 terbagi tingkatan pendidikan diantaranya pegawai CPNS dan PNS sebanyak 2.369 orang dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 201 orang, S1 sebanyak 1.045 orang, D4 sebanyak 226 orang, D3 sebanyak 283 orang, D1/D2 sebanyak 86 orang dan $\leq$ SMA sebanyak 523 orang, sisanya adalah PPPK dengan jumlah 1.901 orang (termasuk PPPK Paruh Waktu) dengan rincian pendidikan S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 1.221 orang, D4 sebanyak 331 orang, D3 sebanyak 210 orang dan $\leq$ SMA sebanyak 51 orang.



Gambar 9 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan tingkat pendidikan

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup Pusluh KP, dilaksanakan tugas belajar bagi seluruh ASN lingkup Pusluh KP. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

D. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki berbagai potensi yang menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja pada Tahun 2026. Potensi tersebut meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, jejaring kerja, serta dukungan kebijakan yang semakin menguat.

Pertama, dukungan kebijakan nasional dan kelembagaan. Pusluh KP memiliki landasan kebijakan yang kuat melalui Renstra KKP Tahun 2025–2029, Renstra BPPSDM KP Tahun 2025–2029, serta implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi pada Blue Economy dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Kondisi tersebut memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung peningkatan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan pelaku utama serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kedua, ketersediaan sumber daya manusia penyuluhan yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, lingkup Pusluh KP didukung oleh 4.258 pegawai, yang terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, 3.911 orang merupakan Penyuluh Perikanan, sehingga menjadi kekuatan utama dalam menjangkau pelaku utama dan pelaku usaha di berbagai wilayah. Dominasi jabatan fungsional Penyuluh Perikanan memberikan kapasitas organisasi yang kuat dalam melaksanakan pendampingan, pemberdayaan, diseminasi

inovasi teknologi, serta penguatan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Ketiga, kompetensi SDM yang memadai. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan diploma dan sarjana, bahkan terdapat pegawai dengan kualifikasi magister dan doktor. Selain itu, pelaksanaan tugas belajar bagi ASN menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan.

Keempat, penguatan tata kelola organisasi melalui pembentukan Tim Kerja. Penugasan pegawai ke dalam Tim Kerja Teknis dan Subbagian Tata Usaha berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat telah memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas masing-masing unit dalam mendukung pencapaian empat belas indikator kinerja Tahun 2026. Mekanisme ini mendorong koordinasi lintas fungsi, mempercepat penyelesaian program, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kelima, dukungan jejaring pelaksanaan penyuluhan yang luas. Selain didukung organisasi pusat, pelaksanaan penyuluhan juga diperkuat oleh delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri atas empat UPT eks riset dan empat Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Jejaring tersebut memperluas jangkauan layanan penyuluhan, memperkuat koordinasi di daerah, serta mempercepat implementasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keenam, transformasi digital dan penguatan tata kelola kinerja. Pengelolaan basis data penyuluhan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, pengembangan materi dan metode penyuluhan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan

Di samping berbagai potensi tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Pertama, tingginya kompleksitas koordinasi penyelenggaraan penyuluhan. Luasnya wilayah kerja, banyaknya penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia, serta keterlibatan berbagai UPT dan pemerintah daerah menyebabkan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program, serta pengendalian capaian kinerja memerlukan mekanisme yang lebih terintegrasi dan adaptif.

Kedua, belum meratanya kapasitas dan kompetensi penyuluh. Meskipun jumlah Penyuluh Perikanan sangat besar, tingkat kompetensi, pengalaman, sertifikasi profesi, serta penguasaan teknologi informasi masih bervariasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan penyuluhan dan efektivitas pendampingan kepada pelaku utama maupun pelaku usaha.

Ketiga, tantangan transformasi digital penyuluhan. Pengembangan sistem informasi, pengelolaan basis data penyuluhan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan penyuluhan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kualitas data, interoperabilitas sistem, maupun peningkatan literasi digital aparatur.

Keempat, dinamika kebijakan dan pengelolaan anggaran. Penyesuaian kebijakan nasional, efisiensi belanja pemerintah, serta perubahan prioritas pembangunan berpotensi memengaruhi ruang fiskal dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sehingga diperlukan perencanaan yang adaptif serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang lebih efektif.

Kelima, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha masih menjadi tantangan. Perbedaan tingkat kapasitas kelembagaan, akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan kemitraan usaha di berbagai daerah menyebabkan hasil pendampingan belum sepenuhnya

merata sehingga memerlukan pendekatan penyuluhan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah.

Keenam, penguatan akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan empat belas indikator kinerja memerlukan dukungan data yang akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data kinerja menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi SAKIP dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
2. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
3. mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
4. menyediakan bahan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya;
5. mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan.

F. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini membandingkan capaian kinerja Triwulan II

Tahun 2026 dengan Rencana Kinerja 2026 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja yang telah dilakukan akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Selan itu, disajikan juga analisis keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama triwulan pada tahun berjalan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dilakukan dengan mengaitkan antara capaian dengan anggaran yang tersedia. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara umum dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat mengenai tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan II Tahun 2026;
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusluh Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi;
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan misi yang disebut Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kegiatan penyuluhan perikanan dapat mendukung Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Asta Cita pada nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8.

Pelaksanaan kinerja Pusluh KP berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDM KP periode 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Sedangkan visi BPPSDM KP adalah **“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.**

Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, Pusat Pusluh KP melaksanakan misi BPPSDM KP, yakni **“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovative, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”**, melaksanakan dua Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM KP Tahun 2025-2029 disusun tujuan berupa **“Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM yang**

Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” maka sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka Pusluh KP merumuskan tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh pelaku usaha mikro dan kecil, serta pendukung sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Memperluas akses pasar pelaku usaha mikro dan kecil Kelautan dan Perikanan, pelau pendukung sector Kelautan dan Perikanan terhadap lembaga permodalan, pasar, serta perizinan berusaha;
3. Mendorong kepedulian pelaku usaha terhadap keberlanjutan sumberdaya dan kelestarian lingkungan pesisir;
4. Memperkuat posisi tawar pelaku usaha Kelautan dan Perikanan melalui penguatan kelembagaan.

Arah

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program Presiden dan mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional. Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju,
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat,
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat,
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari seluruh tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 10 Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy)

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan Kelautan dan Perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029. Maka arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah Perluasan kawasan konservasi perairan, Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan, Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, Pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, BPPSDM melakukan transformasi dibidang penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa target visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Terwujudnya Pengelolaan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dapat tercapai dengan baik melalui penyelenggaraan Transformasi Penyuluh. Transformasi penyuluhan merupakan bagian penting dari arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor Kelautan dan Perikanan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan relevansi penyuluhan terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

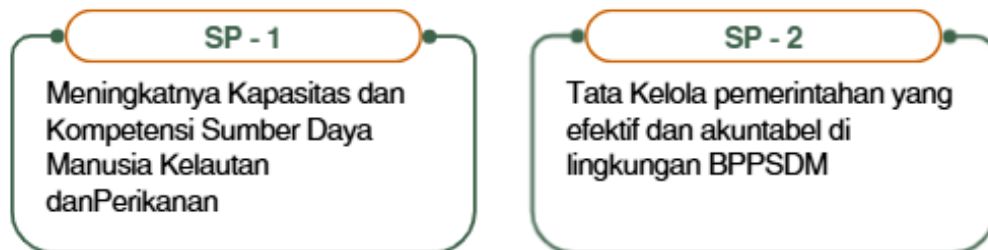
Penyuluh berperan penting dalam mempercepat adopsi teknologi inovatif, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Penyuluh difungsikan sebagai fasilitator yang memastikan pelaku usaha memperoleh akses permodalan, memperkuat jejaring pasar, dan memenuhi standar produksi nasional melalui system OSS. Selain itu, penyuluhan mendukung penguatan kelembagaan koperasi desa/kelurahan (KDMP) sebagai wadah usaha kolektif masyarakat pesisir.

Strategi peningkatan kapasitas penyuluhan kelautan dan perikanan dengan pendekatan *SUPER Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable Extension)* dalam mendukung arah kebijakan dalam rangka transformasi penyuluhan adalah sebagai berikut:

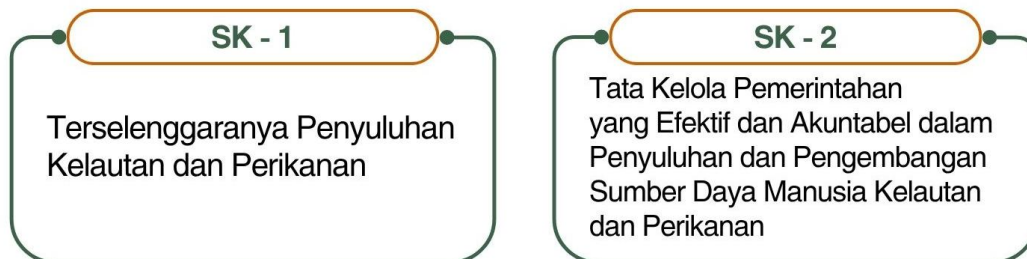
1. Transformasi peran Penyuluh Perikanan melalui pendampingan program prioritas kelautan dan perikanan dan integrasi penyuluhan berbasis digital;
2. Penguatan sarpras percontohan, teknologi inovatif, dan media penyuluhan adaptif lokasi;
3. Fasilitasi akses pelaku usaha Kelautan dan Perikanan ke pembiayaan, pasar, koperasi, serta penataan OSS berbasis kepatuhan standar produksi;
4. Implementasi percontohan teknologi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model *Good Practices*.

Sasaran

Sasaran Strategis (SS) Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari bidang sumber daya manusia tercantum pada **SS-4 yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan”**. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM KP menjabarkan kedalam Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu :



Sedangkan Pusluh KP sendiri memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2026 mengacu pada Sasaran Program BPPSDM KP yang diturunkan dari Sasaran Strategis KKP, yaitu:



B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2026 menetapkan dua kegiatan, yaitu Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdapat pada seluruh unit kerja lingkup Pusluh KP (Tabel 2).

Tabel 3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusluh KP TA 2026

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	22.343.260.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	659.185.504.000
Total Anggaran		681.528.764.000

Rincian anggaran dalam rangka pelaksanaan dua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Pagu Anggaran Unit Kerja lingkup Pusluh KP Tahun 2026

No.	Unit Kerja	Kegiatan Penyuluhan (Rp)	Kegiatan Dukungan Manajemen (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	500.000.000	18.046.750.000	18.546.750.000
2	BBRBLPP Gondol	2.564.685.000	74.204.352.000	76.769.037.000
3	BRPPUPPP Palembang	2.350.365.000	84.387.897.000	86.738.262.000
4	BRPBAPPP Maros	3.228.585.000	111.221.057.000	114.509.642.000
5	BRPBATPP Bogor	3.243.965.000	108.351.083.000	111.595.048.000
6	BPPP Medan	76.131.048.000	2.471.520.000	78.602.568.000
7	BPPP Ambon	2.052.000.000	42.990.365.000	45.042.365.000
8	BPPP Banyuwangi	3.575.040.000	96.297.993.000	99.873.033.000
9	BPPP Bitung	2.297.100.000	47.554.959.000	49.852.059.000
Total Anggaran		95.442.788.000	567.479.226.000	681.528.764.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada PK tersebut terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai dengan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target 14 IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

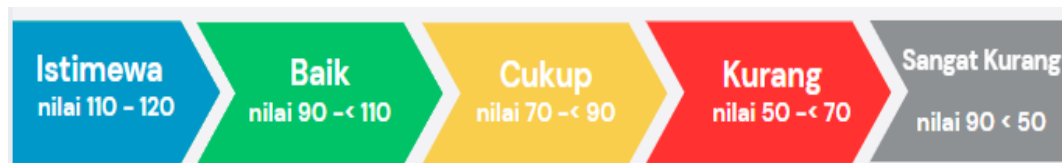
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pusluh KP berpedoman pada dokumen Manual Indikator Kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja secara berjenjang mulai dari Level III hingga Level 0. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data capaian kinerja yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja (Aplikasi Kinerjaku) pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Selanjutnya dokumen data dukung diverifikasi untuk memastikan bahwa capaian kinerja tersebut sudah valid.

Nilai kinerja adalah akumulasi capaian indikator kinerja dan rencana aksi yang ditetapkan dalam PK, dihitung berdasarkan bobot perspektif untuk mengukur keberhasilan organisasi secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dinyatakan dalam predikat:



Gambar 11 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Penghitungan nilai capaian kinerja perlu memperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang didasarkan pada tingkat validitas IKK (Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi).

Tabel 6 Bobot validitas IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Masing-masing tingkat validitas IKK memiliki bobot yang didasarkan pada karakter capaian kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Validitas Outcome yaitu manfaat atau dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja yang terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menentukan dan menyepakati tingkat polarisasi kinerja, yang terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize* dengan rincian sebagai berikut:

1. *Maximize*, yaitu semakin tinggi pencapaian dibandingkan target maka kinerja semakin baik, sebaliknya jika capaian semakin rendah maka kinerja semakin buruk;
2. *Minimize*, yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, sebaliknya jika capaian semakin tinggi maka kinerja semakin buruk;
3. *Stabilize*, yaitu semakin stabil atau mendekati nilai target (tidak berbeda jauh dari target) maka kinerja yang dicapai semakin baik.

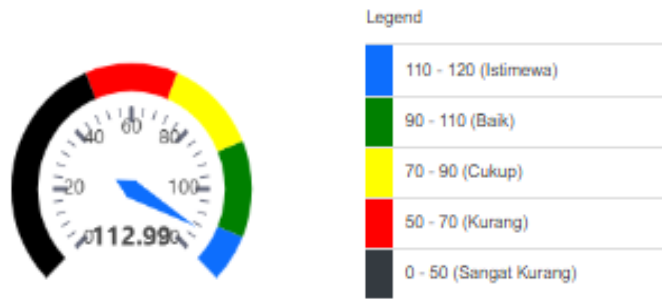
Tabel 7 Klasifikasi target indikator kinerja

MAXIMIZE	KLASIFIKASI		STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
	MINIMIZE	STABILIZE	
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2026 Pusluh KP melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai dua Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai capaian SK dan IKK Tahun 2026 diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sistem aplikasi Pengelolaan Kinerja (Kinerjaku) yang dapat diakses melalui laman *kinerjaku.kkp.go.id*.



Gambar 12 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusluh KP pada Aplikasi Kinerjaku
Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Pusluh KP pada aplikasi Kinerjaku menunjukkan capaian Triwulan II Tahun 2026 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,99% dengan predikat **Istimewa** (di atas target yang telah ditetapkan).

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi pencapaian antar target yang telah ditetapkan dalam PK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian, Evaluasi atas Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan secara bertahap dan berjenjang dari Level III hingga Level 0.

Analisis kinerja merupakan evaluasi sistematis terhadap pencapaian tujuan, efektifitas dan efisiensi kinerja terhadap IKK yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada PK Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKK yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dapat tercapai. Capaian SK dan IKK Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8 Capaian IKK Pusluh KP Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Persentase Capaian (%)
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13	4	4,32	108
		2 Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	-	-	-
		3 Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	-	-	-
		4 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4	-	-	-
		5 Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1	-	-	-

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Persentase Capaian (%)
		6 Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7 Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	-	-	-
		8 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86	86	100	116,28
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1	84	97,14	115,64
		10 Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	-	-	-
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75	-	-	-
		12 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	70	84,33	120
		13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81	-	-	-
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77	77	100	120 (129)

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan **Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan** terdiri dari enam IKK yang ditargetkan di Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang berhasil meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir, setelah mendapatkan pendampingan oleh penyuluh perikanan. Peningkatan kelas kemampuan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung persentase jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor Kelautan dan Perikanan yang meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir dengan membandingkan terhadap jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh pada tahun sebelumnya.

Tabel 9 Capaian IKK 1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan

IKK-1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya										
Realisasi TW II				Tahun 2026				Persentase Kenaikan 2025-2026	Renstra BPPSDM 2025-2029	
2022*	2023*	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian		Target 2029	Persentase Capaian Terhadap Target 2029
-	-	-	7	13	4	4,32	108	-	22	19,64

*) Capaian 2020-2023 (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan)

Pada Triwulan II Tahun 2026, IKK-1 ditargetkan sebesar 4% dan telah tercapai sebesar 4,32% (108%), Indikator kinerja ini memiliki periode pengukuran Triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena IKK tersebut belum ditargetkan. Bila dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM KP Tahun 2025-2029 telah terealisasi sebesar 19,64% dari target 22% di tahun 2029. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan Eselon II lain maupun dengan Kementerian lain karena hanya ada di Pusluh KP.

Tabel 10 Rincian capaian Persentase Kelompok Pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

Jumlah Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya		Jumlah Kelompok disuluh Tahun 2025	Persentase Kelompok yang Ditingkatkan kelasnya Triwulan II Tahun 2026
Tahun 2025	TW II Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	$\frac{(1 + 2)}{(3)} \times 100\%$
1.313	204	35.112	4,32%

Berdasarkan capaian tabel diatas secara keseluruhan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya selama dua tahun terakhir (2025 – Triwulan II Tahun 2026) adalah sebesar 1.517 kelompok, sedangkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh pada tahun 2025 adalah sebanyak 35.112 kelompok, sehingga diperoleh persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya adalah sebesar 4,32%. Capaian tersebut dikontribusi dari empat UPT Eks Riset yang menangani Penyuluhan dan empat UPT Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah kelompok yang ditingkatkan Tahun 2025-2026

No	UPT/Satminkal	Jumlah Kelompok Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2025	Jumlah Kelompok Ditingkatkan Kelasnya s.d Triwulan II Tahun 2026	Jumlah
1	BBRBLPP Gondol	118	12	130
2	BRPPUPP Palembang	160	5	165
3	BRPBAPP Maros	175	25	200
4	BRPBATPP Bogor	250	12	262
5	BPPP Medan	210	24	234
6	BPPP Ambon	30	48	78
7	BPPP Banyuwangi	260	66	326
8	BPPP Bitung	110	12	122
	Jumlah	1.313	204	1.517

Tabel 12 Jumlah kelompok yang disuluh Tahun 2025

No	UPT/Satminkal	Jumlah Kelompok Disuluh Tahun 2025
1	BBRBLPP Gondol	3.768
2	BRPPUPP Palembang	3.711
3	BRPBAPP Maros	5.500
4	BRPBATPP Bogor	5.665
5	BPPP Medan	4.598
6	BPPP Ambon	2.600
7	BPPP Banyuwangi	6.220
8	BPPP Bitung	3.000
9	BPPP Tegal*	50
	Jumlah	35.112

*) BPPP Tegal masih melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan pada Tahun 2025

Nilai Capaian IKK Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya pada Pusluh KP sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Kepala BPPSDM KP Nomor 720/BPPSDM.2/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian data dukung Indikator Kinerja: Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Triwulan II Tahun 2026.

Faktor keberhasilan IKK ini dapat dilihat dari capaian persentase peningkatan kelas terhadap 1.517 kelompok dari total 35.112 kelompok yang mendapatkan pendampingan (4,32%) merupakan indikator keberhasilan transformasi kelembagaan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan. Pencapaian ini merefleksikan efektivitas tata kelola manajerial UPT Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mengorganisir kegiatan pendampingan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). UPT telah berhasil menjalankan fungsi verifikasi dan validasi secara sistematis, sehingga proses kenaikan kelas kelompok tidak sekadar menjadi sasaran kuantitatif, melainkan cerminan dari peningkatan mutu kelembagaan pelaku usaha yang terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendukung kebijakan dan alokasi sumber daya yang dikelola oleh unit kerja telah mampu memfasilitasi kebutuhan esensial pelaku usaha untuk berkembang ke level yang lebih mandiri.

Secara simultan, dari aspek Penyuluh Perikanan, persentase tersebut membuktikan keberhasilan fungsi pendampingan teknis dan manajerial. Peningkatan kelas kelompok merupakan proses kompleks yang memerlukan bimbingan intensif dalam aspek tata kelola administrasi, penguasaan teknologi produksi, serta penguatan akses pasar dan permodalan.

Kegiatan dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari keberhasilan 1.577 kelompok dalam memenuhi kriteria kenaikan kelas menunjukkan bahwa penyuluh perikanan berperan aktif sebagai katalisator yang kompeten dalam mengubah pola pikir serta keterampilan pelaku usaha. Meski mencakup proporsi 4,32% dari total sasaran suluh, angka tersebut merepresentasikan kualitas pendampingan yang mendalam dan berkelanjutan, di mana penyuluh berhasil menyeimbangkan antara penyebaran informasi secara luas dengan pembinaan yang bersifat akseleratif bagi kelompok-kelompok pelaku usaha yang potensial.

IKK Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya didukung dengan anggaran sebesar

Rp143.354.965.667 pada Triwulan II Tahun 2026 anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp75.945.507.912 (52,98%).

INDIKATOR KINERJA 2

Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Teknologi terekomendasi adalah teknologi tepat guna hasil dari inovasi di bidang Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan, yang telah mendapatkan rekomendasi melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai materi penyuluhan. Pemberian rekomendasi dilakukan melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh Tim Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Tepat Guna untuk materi penyuluhan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan 1 rekomendasi teknologi dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat capaian kinerja, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tetap berjalan, adapun progres kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim seleksi teknologi rekomendasi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tepat Guna untuk Materi Penyuluhan;
2. Pelaksanaan seleksi rekomendasi teknologi sedang proses penilaian tahap I oleh masing-masing tim penilai yang dilaksanakan pada 8-22 Juni 2026, dan dilanjutkan dengan pengolahan hasil seleksi dan penilaian tahap 1 oleh tim sekretariat, sebelum diterbitkan hasil pengumuman seleksi tahap 1 kepada pengusul.

IKK Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluh Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi) didukung dengan anggaran sebesar Rp21.180.000 pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp5.835.500 (27,55%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan

Materi Penyuluhan adalah isi atau substansi pengetahuan, informasi, keterampilan atau sikap yang disampaikan oleh Penyuluh kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka secara berkelanjutan, Adapun materi Penyuluhan terdiri dari Pengembangan sumber daya manusia; Peningkatan modal sosial budaya; Ilmu pengetahuan dan teknologi; Informasi; Ekonomi; Manajemen; Hukum; dan Pelestarian lingkungan

Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh Penyuluh untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap dan perilaku kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung, Penyusunan Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang terstandar mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, metode Penyuluhan dikelompokkan berdasarkan tujuan penyuluhan; jumlah sasaran; media yang digunakan; dan teknik komunikasi.

IKK ini ditargetkan untuk menghasilkan 6 paket Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar dengan periode pengukuran tahunan, sehingga belum terdapat capaian kinerja di triwulan II tahun 2026, meskipun demikian progres kegiatan pada IKK ini tetap dilaporkan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan materi penyuluhan Tahun 2026
Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP Nomor B.199/BPPSDM.2/RSDM.520/I/2026 tentang Identifikasi kebutuhan materi penyuluhan tahun 2026 pada Triwulan II Tahun 2026;

2. Telah disusun materi atau metode penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan judul:
 - 1) Vanamerator Hebat Tradisional dan Teknologi Budidaya Kepiting Bakau Menggunakan Crab Drum;
 - 2) Teknologi Budidaya Kepiting Bakau menggunakan Crab Drum;
 - 3) Inovasi Pembuatan Es Krim (Ice Cream) Rumput Laut;
 - 4) TAIGAN Generasi 5 (Tong Asap Ikan Gantung);
 - 5) BALUIK (Budi Daya Belut Sawah Sistem Bertingkat);
 - 6) LARITA (Lampu Ri Tallangang).
3. Diseminasi materi pada KMS materi penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan video conference pelaksanaan penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada <https://s.id/kms-pusluhkp>.

IKK Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Model) didukung dengan anggaran sebesar Rp132.414.242.000 pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp69.257.434.539 (52,30%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik untuk menghasilkan teknologi adaptif lokasi yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.

Percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan untuk menghasilkan 4 model percontohan penyuluhan yang diterapkan dengan periode pengukuran tahunan, sehingga belum terdapat capaian kinerja di Triwulan II Tahun 2026. Adapun progres kegiatan yang mendukung IKK ini diantaranya:

1. Telah disusunnya Perka BPPSDM No.9 Tahun 2026 tentang Unit Percontohan Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
2. Telah disusun Laporan monitoring dan evaluasi percontohan penyuluhan Triwulan II tahun 2026.

IKK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model) didukung dengan anggaran sebesar Rp1.109.622.667 pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp322.210.000 (29,04%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan

Desa Perikanan Cerdas merupakan konsep pembangunan dan pengembangan desa perikanan yang berbasis manajemen tepat guna, berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan Desa Perikanan Cerdas mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village (SFV)* yang berlaku. Lokasi Desa Perikanan Cerdas ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan pada tahun berjalan, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village SFV* akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

IKK ini ditargetkan sebesar 1 lembaga dengan periode pengukuran tahunan, sehingga di triwulan II tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Namun demikian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK tersebut tetap dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Penentuan Rona Awal dengan survei pengukuran dimensi SFI Desa Gempokerep dan masih menunggu Analisa matriks dengan system skoring atau penilaian indicator SMART;
2. Telah dilakukan bimbingan teknis pembenihan ikan nila menjadi fillet ikan, kaki naga, kerupuk, dan keripik telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 15-16 Mei 2026. Peserta Bimtek adalah Pokdakan dan Poklahsar di lokasi SFV Desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
3. Telah dilakukan pendampingan kegiatan budidaya, pembenihan ikan dan pengolahan ikan, serta persiapan panen siklus 1.

IKK Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga) didukung dengan anggaran sebesar Rp766.163.667 pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp23.629.611 (3.08%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan untuk tercapai 70% dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengusulan 259 pegawai yang akan melaksanakan uji kompetensi penyuluh dimana jumlah pegawai yang diusulkan diperoleh dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 3 orang, BBRBLPP 30 orang, BRPBAPPP 47 orang, BRPBATPP 30 orang,

BRPPUPP 42 orang, BPPP Medan 12 orang, BPPP Banyuwangi 60 orang, BPPP Bitung 16 orang, BPPP Ambon 25 orang;

2. Telah dilakukanya verifikasi serta validasi usulan peserta uji kompetensi penyuluh yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Telah dilaksanakan penilaian kompetensi pengisian jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan ahli madya yang diikuti oleh 19 penyuluh perikanan muda tanggal 11 Juni 2026.

IKK Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%) didukung dengan anggaran sebesar Rp10.961.679.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp4.449.867.916 (40,59%).

SASARAN KEGIATAN 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari delapan indikator kinerja, yaitu:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data penyuluhan pada aplikasi KUSUKA dan/atau aplikasi Penyuluhan KP dalam sistem basis data terpadu (*One Data*). Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah media yang digunakan oleh Pusat Penyuluhan KP untuk menyimpan dan menyampaikan informasi data kepada stakeholder.

Kegiatan Pengelolaan Basis Data Penyuluhan KP mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan tercapai sebesar 80% dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja, namun kegiatan yang mendukung tercapaian IKK tersebut tetap dilaksanakan. Progres kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengumpulan basis data penyuluh Saat ini masih dilakukan proses verifikasi dan validasi data capaian Semester I Tahun 2026;
2. Telah dibuat laporan penyusunan bank data (*repository*) penyuluh Triwulan II Tahun 2026.

IKK Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) didukung dengan anggaran sebesar Rp7.680.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp3.453.500 (44.97%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan indikator kinerja yang mengukur penyelesaian tindak lanjut atas temuan pengawasan, Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut TUNTAS oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.

Rekomendasi hasil pengawasan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan total rekomendasi yang diperoleh. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan

polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode Triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan.

Tabel 13 Capaian IKK 8 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK- 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
Realisasi TW II				Tahun 2026				Renstra BPPSDM 2025-2029		
2022*	2023*	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Persentase Kenaikan 2025-2026	Target 2029	Persentase Capaian Terhadap Target 2029
100	75	82	96	86	86	100	116,28	-	89	112,36

*) Capaian 2022-2023 (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan)

IKK ini ditargetkan untuk tercapai pada Tahun 2026 sebesar 86% dengan periode pengukuran triwulanan. Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 100% dengan persentase capaian IKK sebesar 116,28%, Capaian IKK dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian 96% maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 112,36% dari target 89%.

IKK ini diimplementasikan pada seluruh unit kerja Eselon II BPPSDM KP, sehingga capaian kinerja Pusluh KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Mengacu kepada Nota Dinas a.n. Kepala BPPSDM KP, Sekretaris BPPSDM KP Nomor B 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 Lingkup BPPSDM Kelautan dan Perikanan”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 14 Nilai Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Lingkup BPPSDM
Triwulan II Tahun 2026

No	Satker Pusat	Temuan Awal	Temuan yang ditindak-lanjuti	Persentase Capaian
1	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1	1	100
2	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	0	0	0
3	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	15	100
4	Pusat Standarisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	0	0	0
5	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	0	0	0
6	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	0	0	0

Dari tabel diatas, capaian tindak lanjut temuan pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menunjukkan performa yang memuaskan dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkup Satker Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Secara komparatif, Pusluh KP memiliki beban tanggung jawab penyelesaian temuan yang paling signifikan, yakni sebanyak 15 temuan awal, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang hanya memiliki satu temuan, maupun unit kerja lainnya yang tidak mencatatkan adanya temuan. Meskipun menghadapi volume temuan yang jauh lebih besar, Pusluh KP mampu menunjukkan konsistensi kinerja yang luar biasa dengan menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan persentase capaian yang mencapai 100%, setara dengan unit kerja yang memiliki beban temuan lebih sedikit.

Faktor Keberhasilan IKK ini dapat dilihat dari Keberhasilan Pusluh KP dalam menindaklanjuti seluruh temuan tersebut mencerminkan adanya komitmen manajerial yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntasnya 15 temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern di Pusluh KP berjalan secara efektif dan responsif dalam menanggapi setiap rekomendasi perbaikan. Selain itu, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang tinggi serta kemampuan koordinasi yang solid antara pimpinan dan staf dalam memitigasi risiko organisasi. Dengan

demikian, Pusluh KP berhasil memposisikan diri sebagai unit kerja yang handal dalam menjaga integritas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sekaligus responsitas terhadap audit dan evaluasi.

Kegiatan dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

IKK Persentase Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp3.890.879.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.884.976.038 (48,45%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Capaian kinerja ini diperoleh dengan penjumlahan dari 7 indikator utama yang ada pada formulasi IKPA diantaranya (Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP serta Capaian Output) sesuai dengan bobot nilai berdasarkan Tingkat kepentingan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 15 Capaian IKK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK-9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
Realisasi TW II				Tahun 2026					Renstra BPPSDM 2025-2029	
2022*	2023*	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Persentase Kenaikan 2025-2026	Target 2029	Persentase Capaian Terhadap Target 2029
-	-	90,87	97,30	92,1	84	97,14	116%	-	92,25	105,30%

*) Capaian 2022-2023 (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan)

IKK ini ditargetkan untuk tercapai sebesar 92,1 dengan periode pengukuran semesteran, pada triwulan II IKK ini ditargetkan sebesar 84 telah terealisasi sebesar 97,14(116%). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025 dengan realisasi sebesar 97,30 maka capaian dapat dikatakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 105,30% dari target 92,25.

IKK ini diimplementasikan pada seluruh unit kerja Eselon II BPPSDM KP, sehingga capaian kinerja Pusluh KP dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Mengacu kepada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Nomor 1879/SJ.2/TU.210/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 16 Nilai perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan unit kerja Eselon II lingkup BPPSDM

No	Satker Pusat	Realisasi
1	Pusat Penyuluhan Keautan dan Perikanan	97,14
2	Pusat Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan	85,26

Dari tabel diatas, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menunjukkan performa yang memuaskan dibandingkan dengan unit kerja Pusat Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki nilai yang lebih tinggi dikarenakan tata kelola keuangan yang berjalan dengan perencanaan matang, eksekusi cepat, dan hasil optimal serta berhasil meminimalkan deviasi anggara.

Faktor keberhasilan IKK ini dapat dilihat dari penyesuaian kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur pada indikator kinerja anggaran pada optimalisasi kualitas perencanaan, penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan, serta adanya komitmen pimpinan untuk mengawal tercapainya nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kegiatan dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung Indikator Kinerja (IKK) ini dapat dilihat melalui kegiatan teknis penyuluhan yang membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih terjadwal dengan baik. Selain itu, terjalin koordinasi yang baik antara penanggung jawab kegiatan dengan pengelola keuangan, serta pelaksanaan rekonsiliasi capaian *output* dan penginputan realisasi fisik pada aplikasi Kementerian Keuangan oleh tim keuangan.

IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp375.563.747.000 dan pada Semester I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp197.398.121.665 (52,56%).

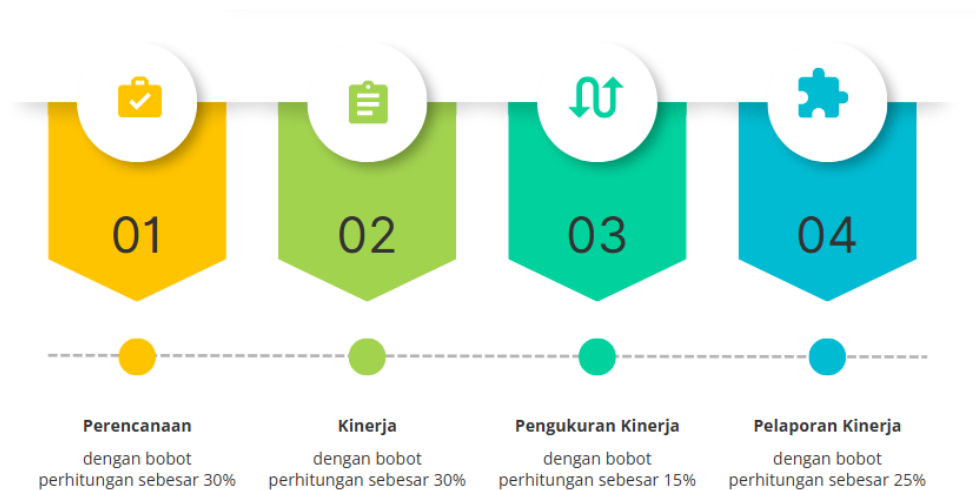
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek

penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP BPPSDM KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, nilai PM SAKIP BPPSDM Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDM KP di lingkungan KKP. PM SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDM KP, dan data capaian diperoleh melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Terdapat empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, sebagai berikut:



Gambar 13 Empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP

Pada Tahun 2026 IKK ini ditargetkan untuk tercapai sebesar 82 dengan periode pengukuran tahunan, namun pada Triwulan II Tahun 2026 telah terdapat progress kegiatan diantaranya melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP, nilai yang diperoleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebesar 84.45 dengan predikat “Memuaskan” total nilai tersebut diperoleh dari penilaian kengkapan dokumen berdasarkan empat komponen yaitu komponen perencanaan kinerja 25.20, komponen pengukuran kinerja 26.10, komponen pelaporan kinerja 12.15 dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal 21.00, namun nilai tersebut belum dapat dijadikan sebagai capaian kinerja karena masi menunggu

finalisasi penilaian dari Sekretariat BPPSDM KP dan merupakan capaian kinerja dengan periode pengukuran tahunan.

IKK Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp26.114.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp7.33.000 (26.90%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk 58ndicato rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap 58ndicator dengan bobot pada masing-masing 58ndicator.

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan untuk tercapai sebesar 71,75 dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan pada IKK ini 58ndica telah disusun dokumen kinerja Pusat Penyuluhan KP dan telah dilakukan Dialog Kinerja Organisasi hingga cascading level 3.

IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp6.281.779.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp2.561.366.917 (40,77%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Kelautan dan Perikanan yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, dengan menggunakan empat dimensi, meliputi: **a) Kualifikasi (bobot 25%), b) Kompetensi bobot (40%), c) Kinerja (bobot 30%), dan d) Disiplin (Bobot 5%).** Kemudian diperhitungkan dengan sistematis dengan menghitung nilai kualifikasi, Nilai Kompetensi, nilai kinerja dan nilai disiplin dengan kategori penilaian Sangat Rendah (<60), Rendah (61-70), Sedang (71-80), Tinggi (81-90) Sangat Tinggi (91-100).

Tabel 17 Capaian IKK 12 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK-12 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
Realisasi TW II				Tahun 2026					Rancangan Kinerja Tahun 2025-2029	
2022*	2023*	2024	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Persentase Kenaikan 2025-2026	Target 2029	Persentase Capaian Terhadap Target 2029
73,12	78,19	86,19	79,97	82	70	84,31	120%	-	83,5	101%

*) Capaian 2022-2023 (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan)

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan untuk tercapai sebesar 82 dengan periode pengukuran semesteran, target Semester I sebesar 70 telah terealisasi sebesar 84,31%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan 5,15%, Bila dibandingkan dengan Rancangan Kinerja Pusluh KP Tahun 2025-2029 telah terealisasi sebesar 101% dari target 83,5%.

IKK ini diimplementasikan pada seluruh unit kerja Eselon II BPPSDM KP, sehingga capaian kinerja Pusluh KP dalam persentase Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Mengacu kepada Nota Dinas a.n. Kepala BPPSDM KP, Sekretaris BPPSDM Nomor 2816/BPPSDM.1/K.720/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Capaian IKU “Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026 lingkup BPPSDM”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 18 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM Triwulan II Tahun 2026

No	Satker Pusat	Target IP ASN	Nilai IP ASN	Persentase Capaian
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	70	84,31	120*
2	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	60	84,58	120*
3	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	50	85,07	120*
4	Pusat Standarisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	80	87,58	109,48

Faktor Keberhasilan tercapainya IKK ini dapat dilihat dari tersedianya sarana pendidikan formal yang diperoleh pegawai baik melalui izin belajar maupun izin belajar mandiri, SKP yang diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dan tersedianya pelatihan maupun seminar sebagai sarana pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara online serta mudah diakses oleh pegawai.

Kegiatan dan Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung IKK ini dapat dilihat dari terdapat pegawai yang mengikuti pengembangan diri untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, komitmen pegawai pada pertanggungjawaban pekerjaan yang telah dilakukan (SKP) dengan predikat kinerja baik sampai baik dengan sangat baik, dan pegawai yang mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan dengan pengembangan kompetensi 20 JP bagi PNS atau 24 JP bagi PPPK.

IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks) didukung dengan anggaran sebesar Rp29.166.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp6.617.300 (22,69%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan

kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan tercapai dengan nilai sebesar 81 dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerjanya. Progres kegiatan pada IKK ini diantaranya adalah telah diperoleh hasil penilaian audit internal kearsipan Pusat Penyuluhan KP senilai 94,48.

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp.18.671.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.2.235.000 (11,97%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Kelautan dan Perikanan. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 19 Capaian IKK 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK-14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW II				Tahun 2026				Renstra BPPSDM 2025-2029		
2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	2025	Target 2026	Target TW II	Realisasi TW II	2025	Target 2026	Target TW II
-	-	-	100	77	77	100	129,87%	-	80	120% (130)

*Capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2023

IKK ini memiliki periode pengukuran Triwulanan pada Triwulan II Tahun 2026 ditargetkan sebesar 77% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan persentasi capaian IKK sebesar 129,87%. namun terdapat batas maksimal persentase nilai capaian yaitu sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku maka nilai terhitung 120%. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 dikarenakan IKK baru tersedia pada Triwulan IV Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan Rancangan Kinerja Pusluh KP Tahun 2025-2029 telah tercapai sebesar 125% dari target 89%.

Nilai capaian IKK Pusluh KP mengacu pada Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP Nomor 2789/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Karena IKK ini merupakan indikator kinerja yang diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP Persentase rekomendasi hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya.

Tabel 20 Perbandingan Capaian IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan
PBJ Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Pusat lainnya

Unit Kerja Eselon II	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	77	100	120 (129,87)
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	77	99,97	120 (129,83)

Capaian kinerja Pusluh KP menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat efektivitas yang melampaui target yang telah ditetapkan. Secara komparatif, Pusluh KP memiliki tingkat keberhasilan yang setara dan konsisten dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan, di mana keduanya berhasil merealisasikan angka 100 dari target sebesar 77. Hal ini menghasilkan persentase capaian sebesar 129,87% karena terdapat nilai maksimal sebesar 120% maka capaian terhitung 120%. Kesetaraan angka ini mengindikasikan adanya standar kualitas kerja yang seragam dan optimal di tingkat Satker Pusat dalam mencapai target strategis organisasi, meskipun keduanya bergerak pada substansi yang berbeda.

Faktor Keberhasilan Pusluh KP dalam mencapai persentase capaian 129,87% mencerminkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pemanfaatan sumber daya serta ketepatan strategi eksekusi program di lapangan. Keberhasilan melampaui target hingga 129,87% tersebut menunjukkan bahwa unit kerja tidak hanya terpaku pada pemenuhan target minimal, tetapi mampu melakukan akselerasi kinerja melalui inovasi pendampingan dan optimalisasi peran penyuluh perikanan. Capaian ini juga mengindikasikan adanya perencanaan yang matang serta responsivitas yang baik terhadap kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, sehingga output yang dihasilkan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari yang diproyeksikan semula. Secara manajerial, hal ini mempertegas kredibilitas Pusat Penyuluhan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama kementerian secara akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan pendukung tercapainya IKK ini adalah melakukan identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kelautan dan Perikanan), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut.

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp7.082.845.000 dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp3.182.211.008 (44,93%).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan II Tahun 2026 kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan seluruh UPT lingkupnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dengan realisasi sebesar Rp355.050.499.906 (52,10%) dari alokasi sebesar Rp681.528.764.000 dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi anggaran lingkup Pusluh KP

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	18.546.750.000	6.966.444.536	37,56%
2	BBRBLPP Gondol	76.769.037.000	39.601.699.439	51,59%
3	BRPPUPPP Palembang	86.738.262.000	45.114.118.199	52,01%
4	BRPBAPPP Maros	114.509.642.000	59.632.990.801	52,08%
5	BRPBATPP Bogor	111.595.048.000	58.390.413.270	52,32%
6	BPPP Medan	78.602.568.000	23.357.979.721	51,86%
7	BPPP Ambon	45.042.365.000	52.269.626.045	52,34%
8	BPPP Banyuwangi	99.873.033.000	28.375.517.106	56,92%
9	BPPP Bitung	49.852.059.000	41.341.710.789	52,60%
	Total	681.528.764.000	355.050.499.906	52,10%

Tabel 22 Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran IKK Pusat Penyuluhan Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET TW II 2026	CAPAIAN TW II 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya	13	4	4,32	108	7020.AFA.166.201.DB NSPK Kelembagaan Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas	143.354.965.667	75.945.507.912	52,98
2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	-	-	-	7020.ABW.129.200.DA Teknologi Terekomendasi Penyuluhan KP	21.180.000	5.835.500	27,55
3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan	6	-	-	-	7020.AFA.166.201.DA NSPK Pelaksanaan Penyuluhan KP	132.414.242.000	69.257.434.529	52,30
4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan	4	-	-	-	7020.AFA.166.201.DD NSPK Percontohan Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas	1.109.622.667	322.210.000	29,04
5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan	1	-	-	-	7020.QDB.646.201.DA Penerapan percontohan SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas	766.163.667	23.629.611	3,08
6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	70	-	-	-	7020.DCC.436.201.DA Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompeten 7020.AFA.166.201.DC NSPK Ketenagaan Penyuluhan KP	10.961.679.000	4.449.867.916	40,59
7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	80	-	-	-	2378.EBA.963.101.DA Layanan Data dan Informasi Penyuluhan KP	7.680.000	3.453.500	44,97
8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	86	86	100	116,28	2378.EBA.962.201.DB Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan	3.890.879.000	1.884.976.038	48,45
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	92,10	84	97,14	115,64	2378.EBA.994 Layanan Perkantoran 7020.RBQ.726.10.DA Gedung dan Bangunan Penunjang Penyuluhan KP 2378.EBA.962 Layanan Umum 2378.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) 2378.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	375.563.747.000	197.398.121.665	52,56

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET TW II 2026	CAPAIAN TW II 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	82	-	-	-	2378.EBA.962.201.DD Penyusunan Kegiatan Penyuluhan 2378.EBA.962.201.DE Penyusunan Anggaran Penyuluhan 2378.EBD.Z25.101.DB Penilaian Mandiri SAKIP Penyuluhan KP	26.144.000	7,033.000	26,90
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	71,75	-	-	-	2378.EBD.Z25.101.DA. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Penyuluhan KP 2378.EBD.Z25.101.DC. Penyusunan Laporan Kinerja dan Rekon Kinerja Penyuluhan KP	6.281.779.000	2.561.366.917	40,77
12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	82	70	84,31	120,44 (120)	2378.EBC.Layanan Manajemen SDM Internal	29.166.000	6.617.300	22,69
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	81	-	-	-	2378.EBD.Z34.101.DA Layanan Persuratan Kearsipan Penyuluhan KP	18.671.000	2.235.000	11,97
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	77	77	100	120 (129,87)	2378.EBA.962.201.DC Penatausahaan Aset 2378.EBA.Z07.101.DA Pengelolaan BMN Penyuluhan KP	7.082.845.000	3.182.211.008	44,93
					113,79		681.528.764.000	355.050.499.906	51,10

D. Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan upaya pemanfaatan sumber daya secara efisien dengan mengoptimalkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta mekanisme kerja yang tersedia untuk mencapai target kinerja. Dengan total pagu anggaran sebesar Rp681.528.764.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai Rp355.050.499.906 atau 51,10%. Tingkat penyerapan tersebut sejalan dengan periode pelaksanaan kegiatan dan mampu mendukung pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,99% dengan predikat Istimewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang telah digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan proporsi waktu pelaksanaan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan efektif dan efisien.

Efisiensi sumber daya juga didukung oleh optimalisasi 4.258 pegawai, termasuk 3.911 Penyuluh Perikanan sebagai sumber daya utama dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas dalam tim kerja, penguatan koordinasi antarunit, pemanfaatan sistem informasi dan data kinerja, serta pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pendekatan tersebut, sumber daya yang tersedia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target output, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Ke depan, efisiensi terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi digitalisasi penyuluhan, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala agar setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran organisasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 112,99% dengan predikat Istimewa, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan dua sasaran kegiatan, yaitu Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja yang pada umumnya menunjukkan capaian sesuai atau melampaui target pada periode pengukurannya.

Dari sisi sumber daya, pencapaian kinerja didukung oleh 4.258 pegawai, termasuk 3.911 Penyuluh Perikanan yang menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan pelaku utama serta pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dukungan sumber daya tersebut dioptimalkan melalui pembagian tugas dalam tim kerja, koordinasi antarunit, pemanfaatan sistem informasi, serta pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Dari aspek anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp355.050.499.906 atau 51,10% dari pagu sebesar Rp681.528.764.000 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja, terutama dalam penguatan kualitas data dan dokumen pendukung kinerja, konsistensi pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan efektivitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya Pusat Penyuluhan

Kelautan dan Perikanan perlu mempertahankan capaian indikator yang telah memenuhi atau melampaui target, sekaligus melakukan langkah perbaikan terhadap aspek yang masih perlu diperkuat. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026 serta meningkatkan kualitas akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

B. Permasalahan dan Tindaklanjut

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen data dukung capaian kinerja, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian administratif dan teknis antara dokumen yang disampaikan dengan format dan ketentuan yang dipersyaratkan. Ketidaksesuaian tersebut terutama terdapat pada dokumen pendukung penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, antara lain warna piagam yang belum sesuai, profil kelembagaan yang pada beberapa dokumen belum memuat subbab secara lengkap, dokumentasi kegiatan yang belum mencantumkan geotagging, penomoran registrasi yang belum sesuai, serta format surat pengesahan yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan. Kondisi tersebut tidak secara langsung menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan, tetapi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas serta validitas data dukung capaian kinerja.

Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman pelaporan capaian kinerja, khususnya dalam penyusunan rekapitulasi data, baik dari aspek format maupun tata cara penulisan. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, menyulitkan proses verifikasi dan validasi, serta memengaruhi konsistensi antara data capaian dengan

dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang sistematis melalui standarisasi format dan checklist kelengkapan dokumen data dukung, penyampaian kembali ketentuan teknis kepada pelaksana dan Penyuluh Perikanan, serta peningkatan proses verifikasi secara berjenjang sebelum dokumen disampaikan sebagai bahan pelaporan kinerja. Dengan demikian, kualitas data dukung dapat ditingkatkan sehingga tidak hanya memenuhi aspek kuantitas capaian, tetapi juga memenuhi aspek ketepatan, kelengkapan, kesesuaian format, keterlacakan, dan validitas dokumen.

Sebagai upaya perbaikan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. UPT yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan agar mengingatkan kepada Penyuluh Perikanan mengenai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 serta pedoman pelaporan capaian kinerja;
2. Memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi berjenjang, mulai dari tingkat pelaksana/penyuluh, UPT, hingga Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Melalui langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV Tahun 2026 tidak hanya mampu mempertahankan pencapaian target kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas data dukung, sehingga setiap capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dapat dibuktikan secara lengkap, valid, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 (TTDE 5 Januari 2026)

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama : Yayan Hikmayani Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama : I Nyoman Radiarta Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 5 Januari 2026	
PIHAK KEDUA Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	PIHAK PERTAMA Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 Ditandatangani Secara Elektronik I Nyoman Radiarta	 Ditandatangani Secara Elektronik Yayan Hikmayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	22.343.260.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	659.185.504.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		681.528.764.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

Lampiran II. Surat Tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
tanggal 6 Februari 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B.431/BPPSDM.2/KP.440/II/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas:

- Kepada : Seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. melaksanakan dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
4. segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA. 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan



Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Pusat Penyuluhan KP,

Yayan Mikmayani
NIP. 196710041999032001

Lampiran I
Nomor : B.431/BPPSDM.2/KP.440/II/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
(1) Tim Kerja Pelaksanaan Penyuluhan							
1.	Ikhsan Haryadi, S.Pi., M.Si. NIP. 19700720 199103 1 002 Pembina Tk.I (IV/b) Analisis Kebijakan Madya	Ketua					10
2.	Hadhi Nugroho, S.T. NIP. 19830519 201012 1 002 Penata Tk.I (III/d) Perencana Muda	Anggota					5
3.	M. Faisol Rizaghozali, S.Pi., M.Si . NIP. 19841007 201012 1 003 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Muda	Anggota					5
4.	Lidya Yulita Widyanti, S.E., M.M. NIP. 19690702 199403 2 001 Pembina (IV/a) Penyusun Laporan Keuangan	Anggota					5
5.	Dwi Nur Fitriyanti, S.Pi. NIP. 19800814 200502 2 001 Penata Tk.I (III/d) Analisis Metode Penyuluhan	Anggota					5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
6.	Dwi Prasetyo, S.Pi. NI PPPK. 198803142025211046 Penata Muda/IX Penata Layanan Operasional	Anggota					
(2) Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan							
7.	Dra. Endang Sriyati NIP. 19680104 199503 2 001 Pembina (IV/a) Perencana Madya		Ketua				10
8.	Sugesti Titik Maryati, S.E NIP. 19800309 201012 2 001 Penata Tk.I (III/d) Perencana Muda		Anggota				5
9.	Novita Ayu Ryandhini, S. Kel. NI PPPK 199211032025212060 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional		Anggota				5
10.	Rahayu Sudrajat, S.Pd NI PPPK 198502222025211067 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional		Anggota				5
11.	Al Bariah Trisiana NI PPPK 198809222025212041 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran		Anggota				5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4		
12.	Adinda Anindya, S.M. NI PPPK 199902122025212040 Penata Layanan Operasional		Anggota				5
(3) Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan							
13.	Cece Sudrajat, S.St.Pi., M.A.P. NIP. 19850201 200701 1 002 Pembina (IV/a) Analisis Kebijakan Muda			Ketua			10
14.	Firdaus, S.H., M.M. NIP. 19711226 200212 1 003 Pembina Tk.I (IV/b) Analisis Hukum Ahli Madya			Anggota			5
15.	Ungki Pebrian, S.E. NIP. 19780218 201101 1 004 Penata Tk.I (III/d) Analisis Materi Penyuluhan			Anggota			5
16.	Eddy Hartono, S.IP. NIP. 19701005 199203 1 002 Penata Tk.I (III/d) Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			Anggota			
17.	Indra Rohada NIP. 19841129 200910 1 001 Pengatur (II/c) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			Anggota			5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
18.	Citra Sundawa, S.Kom. NI PPPK. 199103122025211048 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional			Anggota			5
19.	Dedy Supriyadi, S.Kom. NI PPPK. 198407022025211040 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional			Anggota			5
20.	Nurdiana NI PPPK 198212042025212024 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran			Anggota			5
(4) Tim Kerja Percontohan Penyuluhan							
21.	Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, M.Si. NIP. 19750921 200212 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Perencana Ahli Madya				Ketua		10
22.	Asep Sopiyan, A.Pi., M.P. NIP. 19740830 200212 1 002 Pembina (IV/a) Analisis Metode Penyuluhan				Anggota		5
23.	Muhammad Aris Nurcholis, S.E., M.M. NIP. 19770610 201012 1 001 Penata Tk.I (III/d) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				Anggota		5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4		
24.	Muallimah Annisaa, S.Kel. NI PPPK. 199008132025212053 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional				Anggota		5
25.	Peter Franky Gerald Mangindaan, M.Si. NI PPPK. 198003192025211016 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional				Anggota		5
26.	Fenny Irene Supusepa, S.Sos. NI PPPK. 196803252025212005 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional				Anggota		5
(5) Subbagian Tata Usaha							
27.	Nurhayati, S.St.Pi. NIP. 19870121 201403 2 002 Penata (III/c) Kepala Subbagian Tata Usaha					Kepala Subbagian Tata Usaha	10
(5.1) Keuangan							
28.	Cecep Ahmad Hatori, S.T., M.Eng. NIP. 19730705 200212 1 004 Penata Tk.I (III/d) Perencana Muda					Koordinator	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4		
29.	Ir. Theresia Lolita N., M.Si. NIP. 19670701 199303 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c) APK APBN Madya					Anggota	5
30.	Arfana W. Laksminingrum Lidwina, S.E. NIP. 19770414 200112 2 002 Penata Tk.I (III/d) Penyusun Laporan Keuangan					Anggota	5
31.	Ridha Afyanti, A.Md. NIP. 19900915 201503 2 001 Penata Muda (III/a) Pranata Keuangan APBN Mahir					Anggota	5
32.	Iwan Saputra NIP. 19780627 199803 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengadministrasi Keuangan					Anggota	5
33.	Djumiati NIP. 19680727 199003 2 004 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengadministrasi Keuangan					Anggota	5
34.	Trisanto Wahyu Nugroho, S.E. NI PPPK. 198606122025211078 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
35.	Wawan Wahyu, A.Md. NI PPPK. 198204032025211059 Pengatur / VII Pengelola Layanan Operasional					Anggota	5
36.	Susanto NI PPPK. 198707242025211048 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran					Anggota	5
(5.2) PBJ							
37.	Ir. Theresia Lolita N., M.Si. NIP. 19670701 199303 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c) APK APBN Madya					Koordinator	5
38.	Muhammad Muslim Mandailing, M.Si. NIP. 19731114 200604 1 003 Pembina (IV/a) Penyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan					Anggota	5
39.	Souli Asianto, S.P. NIP. 19811109 200604 1 002 Penata Tk. I (III/d) Analisis Barang Milik Negara					Anggota	5
40.	Yuni Andayani, S.E. NI PPPK. 199206192025212055 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
(5.3) BMN dan Kerumahtanggan							
41.	Souli Asianto, S.P. NIP. 19811109 200604 1 002 Penata Tk. I (III/d) Analisis Barang Milik Negara					Koordinator	5
42.	Suriani, S.E. NIP. 19691219 200312 2 002 Penata Tk.I (III/d) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					Anggota	5
43.	Usep Nasrudin NIP. 19720701 200212 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengelola Barang Milik Negara					Anggota	5
44.	Iwan Setiawan NIP. 198104152025211046 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran					Anggota	5
45.	Chairil Anwar NI PPPK. 198202052025211045 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran					Anggota	5
46.	Tanki Yusharto, S.IP. NI PPPK. 198211112025211047 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
47.	Usep Ari Hidayat NI PPPK. 199501182025211065 Operator Layanan Operasional					Anggota	5
48.	Wandi Hermawan NI PPPK. 198604042025211103 Operator Layanan Operasional					Anggota	5
49.	Saiful ABD Rahman, S.Pi NI PPPK. 198612092025211034 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
50.	Basri Mohamad Saleh NI PPPK 199207162025211085 Operator Layanan Operasional					Anggota	5
(5.4) Program, Anggaran dan Monev							
51.	Noor Bimo Adhiyudanto, S.Si NIP. 198506242009011002 Penata (III/c) Perencana Muda					Koordinator	5
52.	Susanna Purna Dewi Suharto, A.Md NIP.19920830 201503 2 003 Penata Muda (III/a) Pengelola Program dan Laporan					Anggota	5
53.	Ananda Listya, S.Pi.					Anggota	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
	NI PPPK 199112262025212047 Penata Muda / IX PPPK Penata Layanan Operasional						
54.	Rizal Fadlan Abida, S.T. NI PPPK 199109252025211038 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
55.	M. Aziz Baharsyah, S.PI. NIP. 199112062025211042 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
56.	Sari Novita, S.T. NI PPPK 198111012025212027 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
57.	Chitra Restu Agustin, S.E. NI PPPK 198908012025212046 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
	(5.6) Kepegawaian						
58.	Norma Tri Utami, A.Md. NIP. 19910804 201503 2 002 Penata Muda (III/a) Pengelola Program dan Laporan					Koordinator	5
59.	Marlea Oktaviani NIP. 19791020 200212 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengadministrasi Kepegawaian					Anggota	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
60.	Eka Sekarwati NIP. 19710208 199203 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengadministrasi Kepegawaian					Anggota	5
61.	Eri Sulistyowati NIP. 19710224 200003 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengadministrasi Bahan Evaluasi dan Pelaporan					Anggota	5
62.	Diana Yulianti NIP. 19750719 200604 2 012 Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi					Anggota	5
63.	Syarif Hidayatullah, S.E NI PPPK 198606122025211078 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
64.	Haerudin NIP. 19840627 200910 1 001 Pengatur Tk.I (II/d) Pengadministrasi Persediaan					Anggota	5
65.	Junaedi NIP. 19830729 200910 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengadministrasi Persuratan					Anggota	5
	(5.7) Kearsipan						

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4		
66.	Retno Sari Widyanti, A.Md. NIP. 19800307 200901 2 005 Penata (III/c) Arsiparis Penyelia		Anggota			Koordinator	10
67.	Bambang Trias Yulianto, S.Fil., M.Si. NIP. 19760701 201012 1 001 Pembina (IV/a) Penyusun Rencana Kegiatan					Anggota	5
68.	Agus Adrianto, S.E. NI PPPK 198008162025211046 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
69.	Klemens Metusala Burdam NI PPPK 197306242025211017 Pengatur Muda / V Pengadministrasi Perkantoran					Anggota	5
70.	Abdul Muhad NI PPPK 198609072025211073 Operator Layanan Operasional					Anggota	5
71.	Muhammad Bukhari NI PPPK 198102222025211056 Operator Layanan Operasional					Anggota	5
72.	Irwan Rumasera, S.AP. NI PPPK 198806032025211085 Penata Layanan Operasional					Anggota	5
(5.8) Data Penyuluhan dan Kelautan							

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4	5	
73.	Ary Budhy Purwoko, S.AP. NIP. 19740102 199903 1 003 Penata (III/c) Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan					Koordinator	5
74.	Dani Candra Rukmana, S.PI. NI PPPK 199110202025211061 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
(5.9) Media Sosial							
75.	Fristiya Heri Kartika, A.Md., S.Kom. NIP. 19760201 200901 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b) Pranata Komputer Pertama					Koordinator	5
76.	Joko Subandriyo, S.T. NI PPPK 198004032025211035 Penata Muda / IX Penata Layanan Operasional					Anggota	5
77.	Ridho Arahman, S.Kom. NI PPPK 199302112025211063 Penata Layanan Operasional					Anggota	5
(5.10) Pengawasan dan Tindak Lanjut							
78.	Dwi Ayu Purwanti, A.Md NIP. 199106042014032001 Penata Muda (III/a) Pengelola Keuangan					Koordinator	5

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP / PANGKAT/ JABATAN	TIM KERJA				Subbagian Tata Usaha	Nilai Beban Kerja
		Pelaksanaan Penyuluhan	Ketenagaan Penyuluhan	Kelembagaan Penyuluhan	Percontohan Penyuluhan		
		1	2	3	4		
79.	Kusnandi NIP. 19720725 200502 1 001 Pengatur Tk.I (II/c) Pengadministrasi Perencanaan & Program					Anggota	5
80.	Agung Pranajaya NIP. 19760815 200701 1 003 Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Umum					Anggota	5



Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Pusat Penyuluhan KP,

Yayan Hikmayani
NIP. 196710041999032001

Lampiran II
Nomor : B.4/3/ /BPPSDM.2/KP.440/II/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM KERJA
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN**

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
1	TIMJA KELEMBAGAAN PENYULUHAN	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	1	Membuat target capaian per UPT Penyuluhan untuk Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP yang dibentuk, Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya, dan Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi sektor KP yang didampingi
			2	Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP yang dibentuk, Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh, Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya, dan Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi sektor KP yang didampingi
			3	Melakukan monitoring dan verifikasi data dukung capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP yang dibentuk, Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh, Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya, dan Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi sektor KP yang didampingi
			4	Melakukan verifikasi Tabulasi Data Profil Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
			5	Membuat piagam pengukuhan kelas kemampuan kelompok utama
			6	Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria tentang Kelembagaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP
			7	Melakukan penghitungan indek persentase kenaikan omzet kelompok yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya
			8	Pemberian apresiasi kepada Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP berprestasi
2	TIMJA PELAKSANAAN PENYULUHAN	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	Melakukan Identifikasi Kebutuhan Teknologi untuk Pelaksanaan Penyuluhan
			2	Melakukan penilaian teknologi terpilih untuk dijadikan teknologi terekomondasi
			3	Diseminasi inovasi teknologi KP yang telah direkomendasikan untuk materi penyuluhan
		Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	1	Melakukan identifikasi kebutuhan materi, metode untuk pelaksanaan penyuluhan KP
			2	Melakukan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan penyuluhan yang meliputi: teknologi, materi, dan metode pelaksanaan penyuluhan
			3	Memilih materi yang dibutuhkan dan distandarisasi
			4	Pembuatan bahan materi untuk pelaksanaan penyuluhan
			5	Monitoring dan evaluasi efektifitas materi, teknologi, metode yang digunakan
			6	Diseminasi materi, teknologi, metode pelaksanaan penyuluhan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
			7	Pembuatan NSPK untuk Pelaksanaan Penyuluhan (kepkabupaten tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan KP, pembuatan media penyuluhan dll)
3	TIMJA PERCONTOHAN PENYULUHAN	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	1	Melaksanakan koordinasi untuk identifikasi calon lokasi desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			2	Melaksanakan koordinasi dalam identifikasi kebutuhan teknologi yang akan diterapkan dalam desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			3	Melaksanakan koordinasi dalam sosialisasi pelaksanaan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan kepada penyuluh yang ada di lokasi terpilih
		Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1	Melaksanakan identifikasi calon mitra dalam pelaksanaan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			2	Melaksanakan kegiatan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			3	Melakukan pendampingan pada kegiatan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			5	Menyusun Laporan kegiatan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			6	Penyusunan NSPK untuk kegiatan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
			7	Menyusun kriteria dan pemberian penghargaan kepada mitra dalam penyelenggaraan desa perikanan cerdas dan percontohan penyuluhan
4	TIMJA KETENAGAAAN PENYULUHAN	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	1	Menyelesaikan permasalahan penyuluh yang melanggar etika kepegawaian
			2	Melakukan pemetaan SDM berdasarkan pendidikan, PAK integrasi, dan tingkat kompetensi

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
			3	Memfasilitasi usulan, pendampingan dan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Penyuluh Perikanan
			4	Melakukan pendataan keragaan penyuluh perikanan
			5	Memfasilitasi usulan mutasi sesuai dengan ABK dan Peta Jabatan
			6	Penataan Penugasan Penyuluh Perikanan terhadap pelaksanaan penyuluhan perikanan dan pendampingan program prioritas KKP
			7	Memvalidasi keragaan penyuluh perikanan lingkup Pusluh KP
5	SUBBAGIAN TATA USAHA	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1	Koordinasi dan pengelolaan APLIKASI digiluh
			2	Melakukan pengelolaan PPID dan Yanblik di Pusat Penyuluhan
			3	Melakukan pengelolaan situs, media sosial, dan podcast di Pusat Penyuluhan
			4	Penyusunan bahan publikasi/diseminasi lingkup Pusat Penyuluhan KP
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	1	Penyiapan dokumen untuk audit Itjen/BPK
			2	Penyiapan dokumen TL hasil rekomendasi Itjen/BPK
			3	Pengelolaan aplikasi SIDAK
			4	Penyusunan Laporan SPIP /MR
			5	Penyusunan Laporan PIPK
			6	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
			7	Pengelolaan Whistleblower System (WBS)
			8	Penyusunan Laporan Implementasi Pengendalian Korupsi dan Gratifikasi
			1	Pengendalian Revisi DIPA
			2	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3	Pengendalian Realisasi anggaran sesuai RPD pada halaman III DIPA dan Target Penyerapan Triwulanan
			4	Pengelolaan pembayaran kontraktual pengadaan barang/jasa
			5	Pengelolaan Pembayaran UP/TUP
			6	Pengelolaan aplikasi Keuangan
		Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	1	Koordinasi dan pelaksanaan monev kegiatan Pusluh KP
			2	Penyusunan Laporan Kinerja Pusluh KP
			3	Penyusunan Laporan Kegiatan Pusluh KP
			4	Pemenuhan dokumen penilaian SAKIP
			5	Pengelolaan Aplikasi Monev
			6	Pengelolaan PUG
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	1	Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program (Renstra/ Renja)
			2	Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran / RKA-KL
			3	Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kinerja
			4	Koordinasi dan pelaksanaan usulan revisi anggaran
			5	Pengelolaan aplikasi perencanaan
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	1	Koordinasi dan pelayanan manajemen SDM lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			2	Koordinasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen talenta
			3	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan magang/PKL
			4	Pengelolaan aplikasi kepegawaian
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	1	Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Tugas dan Fungsi	
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	2	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
			3	Pengelolaan aplikasi SIRUP
			4	Penyusunan Spesifikasi Teknis dan KAK Pengadaan Barang/Jasa
			5	Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa
			6	Penyusunan kontrak/SPK
			7	Penyusunan SPPBJ
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN)
			2	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN
			3	Penyusunan usulan reklas aset
			4	Penyusunan usulan penghapusan BMN
			5	Penyusunan Laporan BMN
			6	Penyusunan Laporan Persediaan
			7	Pengelolaan aplikasi BMN dan Persediaan

Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Pusat Penyuluhan KP,



Yayan Hikmayani
NIP. 196710041999032001

Lampiran III. Rancangan Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

RANCANGAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029
KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Persen)	6	13	16	19	22
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	30.000	40.100	44.300	48.000	53.000
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157	1.326	1.464	1.621	1.746
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.000	4.200	3.700	3.700	3.600
		Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300	400	400	400	400
		Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Miliar)	1,3706				
	2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)		1	5	5	5
		Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1				
	3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	6	6	6	6
	4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)		4	11	15	19
		Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3				
	5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)		1	10	12	14
	6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)		70	72	74	76
		Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	24	50	300	400	500
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	3,2				
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	4,0				
	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		80	81	82	83
		Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1				
		Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5				
	8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85	86	86	86	86
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92	92,1	92,1	92,1	92,1
	10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	82	82	82	82
	11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5	71,75	71,75	71,75	71,75
	12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	82	82	82	82
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)		81	81	81	81
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	77	77	77	77
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80				

Keterangan: Sumber

PK 2025 Pusluh KP (Desember 2025)

PK level II dan III 2026 lingkup Pusluh KP (Januari 2026)

Renstra BPPSDM KP 2025-2029

Usulan